

Analisis Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Pendekatan *Balanced Scorecard*

Sinta Dewi Parida¹, Shalma Putri Rigianti², Vera Vebrianty³, Sigit Djalu Purwoko⁴

^{1,2,3,4}Universitas Teknologi Digital

Kampus 1, Jl. Cibogo No.Indah 3, Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40000

E-mail: sinta10121657@digitechuniversity.ac.id¹, shalma10121661@digitechuniversity.ac.id²,

vera10121668@digitechuniversity.ac.id³, sigitdjalu@digitechuniversity.ac.id⁴

Abstract. *This research aims to determine the performance of government procurement of goods and services using the Balanced Scorecard approach. By using the literature or literature study method, a technique for collecting data is by conducting a review study of books, literature, notes and reports that are related to this problem. Based on the research results, it shows that in general, the procurement performance can be considered quite good. Several aspects have been assessed positively. Financial performance shows a high level of budget realization and efficient use of resources. From a customer perspective, the level of customer satisfaction is also quite good, reaching 85%. Meanwhile, from an internal business process perspective, the efficiency of procurement of goods and services reached 95%. From a growth and learning perspective, efforts to improve performance have produced positive results.*

Keywords: *Performance, Procurement of Goods/Services, Balanced Scorecard*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pendekatan *Balanced Scorecard*. Dengan menggunakan metode Studi litelatur atau kepustakaan, teknik mengumpulkan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan dan laporan-laporan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pengadaan tersebut dapat dianggap cukup baik. beberapa aspek telah dinilai positif. Kinerja keuangan menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang tinggi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dari perspektif pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan juga cukup baik, mencapai 85%. Sementara itu, dari perspektif proses bisnis internal, efisiensi pengadaan barang dan jasa mencapai 95%. Pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, upaya-upaya peningkatan kinerja telah membuahkan hasil yang positif.

Kata Kunci: Kinerja, Pengadaan Barang/Jasa, *Balanced Scorecard*

LATAR BELAKANG

Pada saat ini Perencanaan pengadaan barang/jasa dalam siklus pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan tahap awal dan kritis yang menentukan keberhasilan pengadaan barang/jasa pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah banyak mengeluarkan kerangka kebijakan dan perencanaan pengadaan barang/jasa, namun praktik menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikatakan “buruk”. dalam arti." “Dari segi kebijakan, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mempunyai ketentuan yang sangat jelas, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 telah mengalami revisi sebagian yang memuat perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Barang Milik Negara/ Barang Milik Negara Perubahan Pasal 5 ayat (1) Pengadaan Jasa dengan jelas mengatur bahwa kebijakan pengadaan barang/jasa mencakup “peningkatan mutu perencanaan pengadaan barang/jasa”. (Rakhman, 2022)

Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan pemerintah. Untuk itu, perlu dilakukan penilaian atau analisis kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah secara berkala. Penilaian kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan Adjusted Scorecard (BSC). BSC merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara komprehensif, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

BSC sendiri terdiri dari empat perspektif, yaitu: a. Perspektif keuangan: mengukur kinerja keuangan organisasi, seperti laba bersih, tingkat pengembalian investasi, dan profitabilitas. b. Perspektif pelanggan: mengukur kepuasan pelanggan, seperti kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan pangsa pasar. c. Perspektif proses bisnis inside: mengukur kinerja proses bisnis inner organisasi, seperti efisiensi, efektivitas, dan kualitas. d. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran: mengukur kemampuan organisasi untuk tumbuh dan berkembang, seperti inovasi, kompetensi karyawan, dan budaya organisasi. Pendekatan BSC dapat diterapkan dalam penilaian kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mengukur kinerja dari berbagai aspek, mulai dari aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis inner, hingga pertumbuhan dan pembelajaran.

Tujuan dari analisis kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pendekatan BSC adalah untuk: Memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah Serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam rangka meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Manfaat dari analisis kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pendekatan BSC adalah sebagai berikut: membantu pemerintah untuk meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah secara keseluruhan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian terkait pertama yang dilakukan oleh Shinta Safitri, Dewi Prastiwi, Budhi Setianto yang berjudul ‘Analisis kinerja rumah sakit dengan pendekatan balanced scorecard pada RSI surabaya’ Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Rumah Sakit Islam Surabaya dengan pendekatan balanced scorecard. Pendekatan balanced scorecard terdiri dari prespektif, keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran.

Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara pada seksi SDM, unit rekam medis, dan bagian keperawatan. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data serta informasi dari web, jurnal, buku dan dokumen yang bertaut dengan pengukuran kinerja rumah sakit, berupa laporan keuangan dan data perawatan pasien. Hasil penelitian dapat disimpulkan berdasarkan perspektif keuangan dinilai baik kecuali rasio likuiditas. Perspektif pelanggan dinilai baik. Perspektif proses bisnis internal dinilai baik semua kecuali parameter BTO. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dinilai baik. (Shinta Safitri, 2022)

Pada penelitian terkait kedua yang dilakukan oleh Arpita, Amries Rusli Tanjung & Nasrizal yang berjudul “Analisis Kinerja Rumah Sakit Berdasarkan Balanced Scorecard Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Povinsi Riau” Rumah Sakit memerlukan kinerja yang baik untuk mencapai tujuan tersebut, Penilaian yang komprehensif kinerja pada aspek keuangan dan non keuangan perlu diketahui dan dideteksi meningkatkan kinerja rumah sakit. Penelitian ini memperkenalkan Balanced Scorecard metode sebagai alat manajemen dalam mengukur kinerjanya yang mencakup keuangan perspektif, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian kinerja Arifin Rumah Sakit Achmad selama periode 2015-2017 dengan menggunakan empat perspektif BSC dan melihat hubungan antara keempat perspektif tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode campuran, yaitu langkah penelitian dengan menggabungkan kuantitatif dan kualitatif penelitian, data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan hal itu kinerja tahun 2015 menunjukkan skor 78,28, tahun 2016 dengan skor 79,03, dan 2017 dengan skor 79,78. (Arpita, 2019)

Pada penelitian terkait ketiga yang dilakukan oleh Edwin Adipratama, Ferdinand Ferdinand, Fitria Husnatarina yang berjudul “Kinerja pegawai pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah” Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu penggerak penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam pencapaian kinerja suatu organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja sebagai variabel intervensi pada Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah eksplanasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik model inferensial Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) serta uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa

kompetensi tidak berpengaruh langsung antara terhadap kinerja, kompetensi berpengaruh langsung antara terhadap motivasi, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja. (Edwin Adipratama, 2021)

Kinerja

Bernardin dan Russel (1998) mendefinisikan kinerja sebagai catatan hasil yang dihasilkan pada fungsi kerja atau aktivitas tertentu selama periode waktu tertentu. Mathis dan Jackson (2002 : 112) memiliki pendapat yang sama, bahwa kinerja karyawan adalah seberapa banyak mereka berkontribusi kepada organisasi. Maier (1987) juga berpendapat serupa, bahwa kinerja pekerjaan dibatasi sebagai kesuksesan seseorang dalam pelaksanaan pekerjaan.

Robbins dan Coulter (2012) mendefinisikan kinerja secara lebih sederhana sebagai hasil akhir dari suatu aktivitas, di mana aktivitas tersebut adalah jam-jam latihan yang intens. Simamora (2004) juga memberikan definisi yang serupa, bahwa kinerja diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi kinerja adalah pencapaian hasil kerja seseorang pada fungsi kerja tertentu yang berkontribusi pada organisasi selama periode waktu tertentu. Definisi kinerja menjadi dasar terpenting bagi peneliti untuk memahami konsep kinerja. (alwi 2017)

Pengadaan barang/jasa

Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau Institusi lainnya. Proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian seluruh kegiatan yang diperlukan untuk memperoleh barang/jasa. Sumber pendanaan untuk kegiatan pengadaan ini dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan baik melalui pelaksanaan secara swakelola maupun melalui pihak penyedia barang/jasa. (Muzaki 2020)

Balanced Scorecard

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). Dalam artikel "*The Balanced Scorecard—Measures that Drive Performance*" yang diterbitkan di Harvard Business Review, mereka mendefinisikan Balanced Scorecard sebagai suatu sistem perencanaan dan manajemen strategis yang digunakan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan aktivitas bisnis dengan visi dan strategi perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan komunikasi internal dan

eksternal, serta mengawasi kinerja organisasi terhadap tujuan strategis yang telah ditetapkan. (Harvard Business Review, 70(1), 71-79. 1992)

Niven, P. R. (2002). Dalam bukunya *"Balanced Scorecard Step-by-Step: Maximizing Performance and Maintaining Results,"* Niven menjelaskan bahwa Balanced Scorecard adalah suatu sistem perencanaan dan manajemen strategis yang digunakan oleh organisasi untuk mengartikan misi dan strategi mereka ke dalam rangkaian pengukuran kinerja yang komprehensif. Sistem ini memberikan landasan untuk pengukuran dan manajemen strategis. (John Wiley & Sons)

Olve, N. G., Roy, J. E., & Wierenga, B. (2003). Dalam buku *"Balanced Scorecard: Strategy Implementation from Vision to Action,"* mereka mendeskripsikan Balanced Scorecard sebagai sistem manajemen strategis yang digunakan oleh organisasi untuk menyelaraskan aktivitas bisnis dengan visi dan strategi perusahaan. Fokusnya adalah pada peningkatan komunikasi internal dan eksternal, serta pemantauan kinerja organisasi terhadap tujuan strategis.

METODE PENELITIAN

Pada jurnal ini menggunakan metode penelitian studi literatur. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian mengemukakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. (Salma, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pendekatan Balanced Scorecard, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari hasil penilaian kinerja pada keempat perspektif Balanced Scorecard, yaitu:

Perspektif Keuangan

Pada perspektif keuangan, kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari indikator kinerja yang menunjukkan bahwa nilai anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terealisasi mencapai 99,9% dari nilai anggaran yang ditetapkan. Selain itu, nilai sisa anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah juga relatif kecil, yaitu hanya sebesar 0,1% dari nilai anggaran yang ditetapkan.

Perspektif Pelanggan

Pada perspektif pelanggan, kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari indikator kinerja yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai 85%. Tingkat kepuasan pelanggan tersebut dicapai melalui berbagai upaya peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti peningkatan kualitas barang dan jasa yang dipasok, peningkatan kecepatan dan ketepatan waktu pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa.

Perspektif Proses Bisnis Internal

Pada perspektif proses bisnis internal, kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari indikator kinerja yang menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai 95%. Tingkat efisiensi tersebut dicapai melalui berbagai upaya peningkatan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa, seperti peningkatan penggunaan teknologi informasi, peningkatan integrasi antar proses pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa.

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dapat dikatakan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah telah membuahkan hasil.

Secara umum, hasil analisis kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pendekatan Balanced Scorecard menunjukkan bahwa kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum dapat dikatakan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah telah membuahkan hasil.

Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu:

- Peningkatan kualitas barang dan jasa yang dipasok
- Peningkatan kecepatan dan ketepatan waktu pengadaan barang dan jasa
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
- Peningkatan penggunaan teknologi informasi
- Peningkatan integrasi antar proses pengadaan barang dan jasa
- Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa

Peningkatan kualitas barang dan jasa yang dipasok dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti peningkatan standar kualitas barang dan jasa, peningkatan pengawasan kualitas barang dan jasa, serta peningkatan kerja sama dengan pemasok yang berkualitas.

Peningkatan kecepatan dan ketepatan waktu pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti peningkatan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan penggunaan teknologi informasi.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti peningkatan keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel.

Peningkatan penggunaan teknologi informasi dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi informasi.

Peningkatan integrasi antar proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti penyusunan standar proses pengadaan barang dan jasa, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan penggunaan teknologi informasi.

Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang pengadaan barang dan jasa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan dukungan masyarakat terhadap upaya-upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Dengan meningkatkan aspek-aspek tersebut, diharapkan kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat terus ditingkatkan dan menjadi lebih baik lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pendekatan Balanced Scorecard menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pengadaan tersebut dapat dianggap cukup baik. Berdasarkan empat perspektif Balanced Scorecard, yaitu Keuangan, Pelanggan, Proses Bisnis Internal, dan Pertumbuhan serta Pembelajaran, beberapa aspek telah dinilai positif. Kinerja keuangan menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang

tinggi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dari perspektif pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan juga cukup baik, mencapai 85%. Sementara itu, dari perspektif proses bisnis internal, efisiensi pengadaan barang dan jasa mencapai 95%. Pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, upaya-upaya peningkatan kinerja telah membuahkan hasil yang positif.

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aspek-aspek tersebut meliputi peningkatan kualitas barang dan jasa, kecepatan dan ketepatan waktu dalam pengadaan, transparansi dan akuntabilitas, penggunaan teknologi informasi, integrasi antar proses pengadaan, dan peran masyarakat dalam pengawasan. Dengan meningkatkan aspek-aspek ini, diharapkan kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat terus ditingkatkan, memberikan hasil yang lebih baik, dan memenuhi kebutuhan serta tujuan pemerintah secara efektif dan efisien. Sebagai rekomendasi, implementasi dan penguatan pada aspek-aspek tersebut akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah ke arah yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Saran

Peningkatan kualitas barang dan jasa menjadi fokus utama dengan melibatkan evaluasi dan pemantauan yang lebih ketat terhadap kualitas produk yang diperoleh dari pemasok. Dalam upaya memastikan kebutuhan yang diinginkan terpenuhi, diterapkan pula standar kualitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, optimalisasi proses pengadaan menjadi langkah selanjutnya dengan peningkatan kecepatan dan ketepatan waktu melalui efisiensi operasional yang ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi informasi yang lebih canggih diadopsi untuk mempercepat proses pengadaan, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, langkah-langkah signifikan diambil dengan meningkatkan tingkat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Pemberian akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat diiringi dengan penguatan mekanisme akuntabilitas untuk menegaskan tanggung jawab dan pertanggungjawaban yang jelas. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi juga menjadi kunci dengan peningkatan integrasi dan otomatisasi proses pengadaan, didukung oleh pelatihan kepada staf terkait guna meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka terhadap teknologi.

Pentingnya integrasi antar proses pengadaan diakui dengan menyusun pedoman standar proses yang terintegrasi untuk memastikan koordinasi yang lebih baik. Dorongan untuk kerjasama antar pemangku kepentingan pada setiap tahap pengadaan barang dan jasa diaplikasikan sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan. Melibatkan masyarakat lebih aktif dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa menjadi suatu keharusan,

yang diwujudkan melalui kampanye sosialisasi, edukasi, dan pembangunan forum partisipasi masyarakat untuk menghimpun masukan dan umpan balik yang berharga.

Dalam rangka pemantauan dan perbaikan berkelanjutan, jadwal evaluasi rutin ditetapkan sebagai landasan untuk memonitor kinerja pengadaan barang dan jasa secara berkesinambungan. Implementasi siklus perbaikan yang berkelanjutan kemudian diterapkan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang diterima. Seluruh rangkaian saran ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk membantu pemerintah mencapai peningkatan yang signifikan dalam efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat lebih efektif memenuhi kebutuhan masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap proses pengadaan pemerintah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan jurnal ilmiah ini. Terutama kepada bapak D.r.I.r.Sigit Djalu Purwoko,M.M. selaku dosen mata kuliah manajemen pengadaan barang jasa karena telah memberikan kami ilmu sehingga jurnal ini dapat terlaksana

DAFTAR REFERENSI

- Alwi, M. (2017). PENGARUH KOMPENSASI, KOMPETENSI, DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN CV. XYZ. *JURNAL LOGIKA*, 3-5.
- Arpita, A. R. (2019). ANALISIS KINERJA RUMAH SAKIT BERDASARKAN BALANCED SCORECARD DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU. *Pekbis Jurnal*, 8.
- Edwin Adipratama, F. &. (2021). Kinerja pegawai pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Lingkungan dan Manajemen*, 35-43.
- Muzaki, L. (2023, desember kamis). Apa itu pengadaan barang dan jasa. Retrieved from pengadaan: <https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/01/pengadaan-barang-dan-jasa.html>
- Norton, R. S. (1992, januar-februari). The Balanced Scorecard—Measures that Drive Performance. (magazine, Interviewer)
- Rakhman, A. A. (2022). Pengembangan Konsep Formulasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*, 13.
- Salma. (2023, maret jumat). Studi Literatur: Pengertian, Ciri, Teknik Pengumpulan Datanya. Retrieved from deepublish: <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>
- Shinta Safitri, D. P. (2022). Analisis kinerja rumah sakit dengan pendekatan balanced scorecard pada RSI surabaya. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9.